

*Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber
"The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"*

- Tema : SIREKAP dan Problematika Pemilu 2024
- Pemateri :
1. Lucius Karus (Peneliti Senior Formappi)
2. Imron Zuhri (*Chief Technology Officer* Dattabot)
3. Arfianto Purbolaksono (Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute)
- Moderator : Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute)
- Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Arfianto Purbolaksono

Arfianto mengatakan bahwa topik "SIREKAP dan Problematika Pemilu 2024" ini adalah juga bagaimana melihat SIREKAP bukan hanya dalam konteks hari ini, tapi juga sebagai implementasi keterbukaan data pemilu di Indonesia yang sejak 2021 The Indonesian Institute mencoba mengikuti proses perkembangannya. Arfianto menyatakan bahwa pemilu yang diselenggarakan harusnya dalam suasana keterbukaan dan penting melihat pemilu dilaksanakan dengan transparan dan terbuka dengan menjalankan prinsip data pemilu terbuka. Berdasarkan NDI (2015), ada 9 prinsip yang mengatur keterbukaan data dalam pemilu: tepat waktu, granular, tersedia gratis di internet, lengkap, dapat dianalisis, *nonproprietary*, *nondiscriminatory*, bebas lisensi, dan tersedia secara permanen.

SIREKAP merupakan bagian Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Tantangan yang didapatkan selama penyelenggaraan keterbukaan data pemilu oleh KPU oleh riset The Indonesian Institute adalah belum optimalnya implementasi SPBE di internal KPU, minimnya sosialisasi tentang pentingnya data pemilu terbuka, dan SPBE masih menjadi persoalan di internal KPUS. Wawancara dengan komisioner KPU di tingkat daerah bilang belum penting ini di daerah. SPBE belum tersosialisasi dengan baik di daerah dan belum dijawab oleh penyelenggara pemilu sendiri untuk menyelenggarakan data pemilu terbuka.

Tantangan kedua adalah keterbatasan SDM. Keterbatasan tenaga pengelola data, karena kurang terampil juga menjadi persoalan. Selain itu, persoalan infrastruktur terkait perangkat komputer, jaringan internet, infrastruktur lainnya yang menunjang keterbukaan data pemilu Indonesia masih kurang. Kondisi ini banyak ditemui di daerah.

Arfianto menyimpulkan bahwa keterbukaan data pemilu sangat penting kedepannya untuk memperkuat integritas pemilu, memberikan harapan transparansi dan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemilu. Tantangan tadi harusnya bisa diantisipasi. Persoalan SDM harusnya bisa ditanggulangi jauh sebelum menjalankan SIREKAP. Sosialisasi dan

bimtek di KPPS masih minim hingga input SIREKAP juga masih minim.

Arfianto beberapanya merekomendasi bahwa KPU perlu memberikan pernyataan sikap dan menyampaikan secara terbuka tentang masalah yang ada, sehingga tidak ada kecurigaan di masyarakat. Mendorong optimalisasi keterbukaan data pemilu, mendorong sosialisasi keterbukaan data pemilu di internal KPU, mendorong pemerataan internet di daerah oleh Kominfo, khususnya untuk nanti di pilkada serentak.

Imron Zuhri

Sebagai seorang praktisi, aplikasi SIREKAP ini secara kompleksitas bukan sebuah aplikasi yang rumit, *it's not rocket science*, aplikasi ini tidak kompleks yang jika dibandingkan dengan aplikasi ujian nasional Kemendikbud belum ada apa-apanya. Uji coba SIREKAP tahun 2020 dinyatakan gagal, permasalahan masih sama sampai sekarang tidak ada yang berbeda. Sebagian besar masalah menurut KPU paling utama ada di SDM. Tapi ini penting sebagai langkah awal transparansi. SIREKAP itu ada dua, satu untuk *mobile* di HP untuk di TPS dan ada yang versi web untuk bantu rekapitulasi di masing-masing jenjang. Peraturan SIREKAP di masing-masing jenjang itu masih belum *clear* status hukumnya. SOP-nya tidak jelas.

Imro lalu menyatakan bahwa di dalam alur kerja SIREKAP ada banyak detil yang perlu diklarifikasi. Minim bimtek menyebabkan banyak yang ke TPS menjadi tidak tahu sehingga muncul berbagai rumor dan konspirasi seperti tidak bisa *upload* dan sebagainya.

Dari kacamata *developer*, SIREKAP bukan aplikasi yang canggih dengan *budget* Rp71 triliun. KPU baru saja mengakui ada koreksi dri 150 ribu TPS atau 20% dari total TPS. Memamng ada masalah teknis, seperti gambarnya buram, salah halaman yang disebabkan oleh kurangnya bimtek tadi. Kita juga tidak tahu algoritma apa yang digunakan dalam *software*-nya. Kalau KPU transparansi itu bukan kewajiban, tetapi untuk membela diri terhadap tuduhan yang ada. Jadi penting untuk transparansi. SIREKAP ini bukan aplikasi rumit dan menurut Imro tidak ada rahasi negara di sana. Penting bagi KPU untuk membuka terkait hal ini.

Bisa dibuka *source code*-nya, dibuka saja semua sehingga memudahkan akuntabilitas dan menjamin kebenaran aplikasi. Kecurigaan soal *backdoor* itu bisa dipatahkan kalau ada keterbukaan. Masalah di TPS dimana ada gambar burem oleh anggota KPPS itu, KPU bisa memberikan fasilitas HP yang standarnya bagus. Kalau waktu pilkada nanti menggunakan SIREKAP dengan kondisi seperti ini, terus ada kecurigaan dari masyarakat, itu akan membuat bahaya. Justru dengan adanya SIREKAP adalah untuk transparansi sehingga semua orang bisa mengaudit bersama-sama.

Lucius Karus

Lucius mengatakan bahwa aplikasi SIREKAP ini sederhana. KPU tertipu dengan tim IT sistem SIREKAP ini sehingga membuat Komisioner KPU mengatakan ini aplikasi luar biasa, padahal para pakar IT mengatakan ini sederhana saja. Sehingga anggaran yang begitu besar menjadi diragukan, banyak aplikasi di Kementerian/Lembaga dengan biaya besar tapi tidak maksimal sebagai kanal informasi dan rujukan publik. SIREKAP itu bukan yang utama dibahas dalam pemilu karena ini alat bantu walaupun kata pengamat lain SIREKAP ini tetap vital.

Kalau sudah dijelaskan SOP-nya SIREKAP dengan baik mestinya kekeliruan banyak di lapangan bisa dimitigasi dan tidak ada konspirasi terkait upaya kecurangan. Tata kelola di KPU belum tuntas karena KPU mungkin tidak paham dengan cara kerja dunia IT. KPU tidak cukup bijak untuk menenangkan publik dan memberikan langkah perubahan serta berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan kembali.

Lucis melanjutkan bahwa Pemilu 2024 tidak hanya terkait persoalan menghitung suara dan rekapitulasi, tapi ada proses sebelum Pemilu yang banyak orang menganggapnya memiliki kecacatan.

Hal-hal mendasar penyelenggaraan pemilu itu menjadi catatan evaluasi penting dan serius kedepan. Kritik penyalahgunaan kekuasaan, intervensi, mobilisasi. Rekomendasi penting terkait tata kelola pemerintahan dan pemilu tidak dari sisi teknis saja tapi memastikan harus ditopang kesadaran penghayatan nilai demokratis. Penting mendalami catatan kritis penyelenggaraan pemilu 2024 dengan lebih substantif karena SIREKAP urusan teknis. Ini penting agar regulasi kedepan bisaantisipasi banyak hal terkait penyelenggaraan pemilu.

PERTANYAAN

1. Adinda Tenriangke Muchtar (TII):

- a. SIREKAP ini memang bukan *rocket science*. Tapi, IT dalam pemilu ini penting karena terkait dengan transparansi dan memberikan fasilitas kepada teman-teman penyandang disabilitas. Menurut narasumber, apa yang perlu disiapkan dalam IT: sistem dan infrastruktur dulu atau *mentality*?
 - Imron Zuhri: terkait sistem IT, kepercayaan itu besar. Kalau kasusnya sudah ekstrim seperti ini, mending dibuka saja semuanya, *source codenya*, algoritmanya sehingga bisa dipelototi bersama. Siapa yang buat, dari mana mengambil sumbernya itu bisa dibuka kepada publik. Ini agar masyarakat tidak saling tebak-tebakan. Marwah keterbukaan itu memang harus secara fundamental dimasukkan sebagai bagian utama dalam proses. Karena ini hajatan besar, Bawaslu bukan lembaga pelaporan, tapi pengawas. Kalau gagal menjaga *trust level* sekarang, nanti akan berbahaya waktu pilkada. Harus melihat secara holistik.
- b. KPU sering dikritik terkait dengan *open data election* oleh masyarakat sipil tapi kurang ditanggapi oleh KPU sehingga terlihat tidak berintegritas. Bagaimana pandangan narasumber?
 - Lucius Karus: integritas tampaknya hanya angin lalu yang penting urusan selesai, kualitas belakangan. Semangat itu yang membuat pemilu kita menjadi tidak ada *spirit*, tidak jelas kemana arah pemilu oleh penyelenggara pemilu ini. Padahal penyelenggara pemilu ini memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan pemimpin berkualitas. *Open data* menjadi jargon saja padahal itu dimiliki publik dan harus dibuka ke publik. Kita perlu mendorong *open data* lembaga penyelenggara pemilu untuk terus dilakukan. Proses pemilihan komisioner soal kapasitas dalam tata kelola dan mengerti IT kedepannya juga penting.
 - Arfianto Purbolaksono: ketika melakukan riset tentang *open data* memang masalahnya ada di *political will* dari komisioner itu sendiri. Persoalannya bukan hanya teknis tapi melihat dalam kerangka besar terkait penyelenggaraan pemilu.

2. Egan (Manggarai NTT): Pergantian komisioner KPU daerah di tengah tahapan pemilu berpengaruh pada fokus anggota KPU menjadi terbagi. Komisioner daerah dituntut harus cepat memahami regulasi khususnya peraturan teknis, disisi lain penyelenggara *ad hoc* harus bisa bekerja maksimal untuk menyukseskan pemilu. Apakah pergantian komisioner daerah menjadi salah satu penyebab pemilu khususnya penggunaan sirekap nyaris memicu persoalan dalam pemilu 2024?

- Arfianto Purbolaksono: Ada faktor-faktor itu di KPU daerah. Penting ketika proses seleksi bukan hanya sekedar melihat dari alumni ormas mana dan didukung partai apa. perlu ada seleksi yang lebih baik agar mendapatkan komisioner KPU dengan kapasitas dan kapabilitas yang baik.
- Lucius Karus: mungkin saja berpengaruh karena di NTT misalnya, KPUD baru dilantik 2 minggu sebelum hari H pemilu. Masalah utama ada di KPPS kecamatan yang *upload* data ke SIREKAP. Saya kira mestinya yang terpilih itu dari Bawaslu sudah paham. Proses selesai mestinya menjamin orang-orang yang terpilih paham. Ada evaluasi rekrutmen penyelenggara pemilu dari pusat sampai daerah agar independensi tetap terjaga.
- Imron Zuhri: SIREKAP itu adalah perangkat yang harus dari awal dikawal biar mumpuni. Makanya perlu ada fasilitas dan bimtek. Bimtek itu masih minim sehingga petugasnya tergesa-gesa. Kalau dana digunakan untuk investasi ini dengan baik tidak akan ada masalah.

3. Dewi Rahmawati (TII):

- a. Kepada Mas Imron, sebagai masyarakat awam, secara teknis meskipun SIREKAP ini dianggap sebagai alat bantu, namun sejauh mana derajat tingkat kepercayaan SIREKAP ini dapat menggambarkan hasil *real* di

lapangan?

- Imron Zuhri: komponennya kan memfoto C hasil dan membaca hasil dari foto tersebut kemudian diinterpretasi jadi angka. Yang paling diributkan yang kedua karena dianggap penggelembungan dan sebagainya. Kalaupun SIREKAP ini tidak ada, ini merupakan kemunduran atas upaya langkah transparansi. Makanya harus dibenarkan kembali dan harus *reliable*.
- b. Kepada Bung Luis, mengenai legitimasi hasil, jika sejak awal proses perekrutan penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu masyarakat tidak menyatakan ketidakpercayaannya, lalu, apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh masyarakat sipil?
- Lucius Karus: Memang ada banyak yang perlu diperbaiki. Sejauh ini seluruh rangkaian sudah berlangsung baik dana man saja walau ada protes dan lain sebagainya itu biasa. Peran masyarakat sipil tentu terus diharapkan guna menjaga proses perekrutan penyelenggara pemilu. Kita harapkan yang bisa bekerja independen sesuai peraturan perundangan-undangan.
4. Felia Primaresti (TII): Mau tanya untuk semua narasumber mungkin, bagaimana selama ini KPU merespons berbagai masalah yang dicatat oleh banyak Lembaga mulai dari kegagalan teknis sampai dengan nonteknis. Apakah ada cerita mengenai dinamika tersebut? atau KPU cenderung acuh dan tidak merespon?
- Lucius Karus: respon KPU tidak pernah membuat persoalan jadi terang benderang. Belum bisa meyakinkan publik. Jawaban KPU tidak membuat orang semakin yakin, justru menimbulkan banyak teori konspirasi.
 - Imron Zuhri: setelah pemilu, KPU minta maaf berkali-kali. Setelah uji coba tahun 2020 itu bukan hanya usulan tapi juga ada rekomendasi. Kita tidak tahu cara lembaga merespon. Harus ada mekanisme masyarakat bisa tahu keluhan itu bukan hanya ditampung tapi direspon dengan baik oleh penyelenggara pemilu.
 - Arfianto Purbolaksono: sejak TII melakukan penelitian *open data*, memang sudah ada kebijakan dan rekomendasi yang didorong. Tapi ini menemui hambatan, apakah rekomendasinya tidak relevan, tidak diperlukan KPU dan Bawaslu, dan lain sebagainya. Upaya masyarakat sipil juga masih terbatas pada melakukan audiensi dan mendorong rekomendasi di media.

CLOSING STATEMENT

Arfianto Purbolaksono: keterbukaan data harus terus diupayakan oleh KPU dan Bawaslu karena belum ada banyak keterbukaan. Bawaslu harusnya juga mengecek keterbukaan data seperti apa, apakah yang lapor sudah ditindaklanjuti dan sebagainya. Jika ada laporan yang tidak ditindaklanjuti itu akan menjadi bahaya kedepannya. keterbukaan data pemilu sangat penting kedepannya dan harus didukung agar optimal.

Imron Zuhri: tidak ada jalan lain selain memaksakan transparansi, bahkan kalau perlu ke sistemnya juga. Harus dikawal juga oleh masyarakat sipil dan semua yang dilakukan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari. Ini upaya kolektif.

Lucius Karus: TII adalah lembaga yang konsisten terhadap proses pengawalan kinerja penyelenggara pemilu. Harus ada yang melihat kiri dan kanan dari pemilu ini. masyarakat sipil perlu banyak didorong di praktik kekuasaan dalam pengelolaan negara termasuk pemilu. Diharapkan masyarakat sipil juga dapat menjaga pemerintahan 2024-2029.

Catatan :

1. **Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>**
2. **Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".**

TERIMA KASIH ~